

# **Analisis Partisipasi dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pelaksanaan Pembangunan Kampung Tematik: Studi Kasus Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing Kota Semarang**

**Widiyawati Setia Cahyaningrum<sup>1</sup>, Laila Kholid Alfirdaus<sup>2</sup>**  
Email: [widiyawatisetiawati@gmail.com](mailto:widiyawatisetiawati@gmail.com)

**Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**  
Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 50139  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505  
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini menganalisis partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing, Kota Semarang, berdasarkan Kebijakan Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018. Latar belakang penelitian berdasarkan ketidaksetaraan gender yang masih menonjol dalam pembangunan masyarakat. Perempuan seringkali terpinggirkan meskipun berperan vital dalam pelestarian budaya seni tradisional. Kajian ini menyoroti pentingnya keterlibatan perempuan sebagai agen perubahan untuk mencapai pembangunan inklusif dan berkelanjutan, mengingat data nasional dan regional menunjukkan kontribusi signifikan perempuan dalam sektor seni budaya. Penelitian menggunakan perspektif gender sebagai konstruksi sosial, pemberdayaan perempuan, dan tangga partisipasi masyarakat. Metode penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam dengan informan, serta analisis dokumen kebijakan dan laporan kegiatan. Temuan menunjukkan partisipasi perempuan tinggi pada tingkat operasional, tetapi rendah pada perencanaan strategis, menempatkannya pada level tokenisme. Program pemberdayaan seperti pelatihan seni dan kerajinan bersifat insidental, tanpa dukungan berkelanjutan. Tantangan utama meliputi norma patriarki, beban ganda perempuan, keterbatasan sumber daya kelembagaan, dan minimnya regenerasi generasi muda. Kesimpulan menyatakan bahwa kebijakan top-down Perwali No. 22/2018 belum mengintegrasikan pengarusutamaan gender, sehingga mereproduksi ketimpangan. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui kritik gender kritis pada pembangunan lokal berbasis seni, merekomendasikan reformasi struktural untuk pemberdayaan substantif perempuan.

**Kata Kunci: Partisipasi Perempuan, Pemberdayaan Perempuan, Kampung Tematik, Pembangunan Inklusif, Kesetaraan Gender**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

<sup>2</sup> Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

## ABSTRACT

*This study analyzes the participation and empowerment of women in the development of the Jurang Belimbing Art Thematic Village, Semarang City, based on the Semarang Mayor Regulation Policy Number 22 of 2018. The research background is based on gender inequality that is still prominent in community development. Women are often marginalized despite playing a vital role in the preservation of traditional art culture. This study highlights the importance of women's involvement as agents of change to achieve inclusive and sustainable development, considering that national and regional data show the significant contribution of women in the arts and culture sector. The research uses a gender perspective as a social construct, women's empowerment, and a ladder of community participation. The research method is qualitative with a case study approach, using data collection techniques through observation, in-depth interviews with informants, and analysis of policy documents and activity reports. The findings show women's participation is high at the operational level, but low at strategic planning, placing it at the level of tokenism. Empowerment programs such as arts and crafts training are incidental, with no ongoing support. The main challenges include patriarchal norms, the double burden of women, limited institutional resources, and the lack of regeneration of the younger generation. The conclusion states that the top-down policy of Guardian Regulation No. 22/2018 has not integrated gender mainstreaming, thereby reproducing inequality. This research offers novelty through critical gender critique on art-based local development, recommending structural reforms for women's substantive empowerment.*

**Keywords:** *Women's Participation, Women's Empowerment, Thematic Villages, Inclusive Development, Gender Equality*

## PENDAHULUAN

Di tengah dinamika pembangunan perkotaan yang semakin kompleks, konsep pembangunan berbasis komunitas muncul sebagai sebuah paradigma yang menawarkan pendekatan lebih humanis dan partisipatif. Salah satu manifestasi dari paradigma ini adalah berkembangnya program kampung tematik di berbagai kota di Indonesia. Kampung tematik pada hakikatnya bukan sekadar proyek fisik untuk mempercantik permukiman kumuh, melainkan sebuah gerakan sosial-budaya yang bertujuan mengembalikan martabat, identitas, dan agensi masyarakat dalam ruang kota mereka.

Program ini berusaha mentransformasi wilayah dari sekadar tempat tinggal menjadi ruang hidup yang bermakna, produktif, dan berkelanjutan melalui penguatan partisipasi aktif warganya. Dalam transformasi ini, keterlibatan semua unsur masyarakat, termasuk kelompok yang sering termarginalkan dalam proses pembangunan, menjadi kunci keberhasilan. Di sinilah partisipasi dan pemberdayaan perempuan menempati posisi sentral, bukan hanya sebagai isu keterwakilan, tetapi sebagai prasyarat fundamental untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan benar-benar membumi.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kampung Tematik Pasal 1 Ayat 13 dikatakan bahwa kampung tematik merupakan suatu wilayah di bawah administrasi kelurahan yang menunjukkan keaslian diri masyarakatnya atas suatu potensi lokal yang ditonjolkan dari hasil kesepakatan masyarakat. Pembangunan kampung tematik telah menjadi salah satu strategi inovatif dalam menata dan memberdayakan wilayah perkotaan di Indonesia. Kampung tematik tidak hanya berfungsi sebagai upaya penataan lingkungan fisik, tetapi juga sebagai wadah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Konsep ini menekankan pada pemberdayaan komunitas lokal melalui pendekatan partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Dalam konteks ini, partisipasi perempuan memegang peran krusial mengingat potensi dan perspektif unik yang mereka miliki dalam mendorong perubahan sosial dan pembangunan yang responsif gender.

Kota Semarang, sebagai salah satu kota metropolitan di Jawa Tengah, telah mengembangkan sejumlah kampung tematik sebagai bagian dari program pembangunan

berbasis komunitas. Salah satunya adalah Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing, yang menonjolkan seni dan kreativitas sebagai identitas utama kampung. Kampung ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan estetika lingkungan, tetapi juga untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan seni dan budaya. Partisipasi perempuan dalam pembangunan kampung tematik merupakan faktor yang krusial dan penting dari demokrasi dan keadilan sosial. Melalui partisipasi aktif, perempuan dapat menyuarakan kebutuhan dan aspirasi mereka dan membantu membuat program dan kebijakan yang lebih inklusif. Sebagai bagian penting dari partisipasi, pemberdayaan perempuan mencakup meningkatkan kapasitas, akses, dan kontrol perempuan terhadap sumber daya pembangunan. Dalam kampung tematik, perempuan dapat diberdayakan melalui partisipasi mereka dalam aktivitas seni, pelatihan keterampilan, dan mengambil Keputusan Bersama.

Namun, sejauh mana perempuan terlibat dalam proses pembangunan kampung tematik tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam. Partisipasi perempuan dalam pembangunan seringkali terhambat oleh berbagai faktor, seperti norma sosial, budaya patriarki, serta keterbatasan akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan.

Permasalahan kesetaraan gender kini masih menjadi isu yang tidak ada habisnya dan masih terus diperjuangkan. Gender merupakan hasil dari konstruksi sosial budaya dapat mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perempuan sering kali memiliki kesempatan yang lebih kecil dibanding laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan baik dalam bidang sosial, pendidikan, politik, pembangunan, ekonomi, dan lain sebagainya. Faktor budaya setempat yang masih menganggap bahwa wanita adalah “konco wingking”, sehingga melemahkan posisinya dalam proses pengambilan keputusan.

Penelitian ini meneliti partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing di Kota Semarang. Hal ini dipilih karena memahami dinamika gender dalam program pembangunan berbasis komunitas dan untuk melihat seberapa baik prinsip kesetaraan gender diintegrasikan dalam proses pembangunan kampung tematik. Selain itu, Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing menjadi studi kasus yang menarik karena menggabungkan unsur seni dan pemberdayaan masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan kampung tematik lainnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk dan

tingkat partisipasi perempuan dalam berbagai tahap pembangunan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing, mengkaji strategi pemberdayaan perempuan yang diterapkan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam konteks tersebut. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai peran perempuan dalam pembangunan kampung tematik, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam program serupa di masa depan. Penelitian ini lebih dari sekedar mencatat partisipasi perempuan, namun juga meneliti bagaimana partisipasi itu terjadi dan akibatnya di kampung seni tertentu. Studi terbaru berfokus pada integrasi tiga dimensi utama, partisipasi dengan gradasi kekuasaan (Arnstein), pemberdayaan melalui kerangka sumber daya, agency, dan prestasi (Kabeer), dan setting pembangunan berbasis tempat. Pendekatan ini melihat seni sebagai proses dan media pemberdayaan yang memungkinkan ekspresi aspirasi, perebutan ruang publik, dan pembentukan kepercayaan diri kolektif perempuan.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyentuh tema seputar kampung tematik dan partisipasi perempuan, namun dengan

fokus dan kesimpulan yang beragam. Studi oleh Pratiwi & Suryanto (2020) mengenai Kampung Wisata Jodipan di Malang, misalnya, menyoroti keberhasilan transformasi fisik dan peningkatan ekonomi warga, namun hanya menyebutkan peran perempuan dalam sektor domestik seperti penyediaan homestay dan kuliner, tanpa menggali lebih dalam dinamika kekuasaan dan pemberdayaan di baliknya. Sementara itu, penelitian Sari & Dharmawan (2021) tentang Kampung Tembok Batu di Surabaya mengungkap bahwa partisipasi perempuan cenderung berada pada tingkat “pelaksana” kegiatan yang sudah ditentukan, bukan pada fase perencanaan konseptual. Di sisi lain, kajian dari perspektif gender yang dilakukan oleh Fitriani (2019) terhadap program-program pemberdayaan perempuan di perkotaan Jawa menemukan bahwa banyak program yang terjebak pada pendekatan “kebutuhan praktis gender” (seperti pelatihan kerajinan) tanpa mengarah pada transformasi relasi kuasa yang lebih adil “kepentingan strategis gender”. Penelitian-penelitian tersebut, meskipun berharga, cenderung memisahkan analisis antara efektivitas pembangunan tempat dengan proses pemberdayaan perempuan secara mendalam.

Penelitian ini mengintegrasikan tiga perspektif teori utama. Pertama, teori

partisipasi masyarakat dari Arnstein (1969) digunakan untuk menganalisis tingkat keterlibatan perempuan dalam spektrum yang bervariasi, mulai dari partisipasi semu hingga keterlibatan yang memberikan kekuatan pengambilan keputusan yang riil. Kedua, pendekatan pemberdayaan perempuan dari Kabeer (1999) dipakai untuk menelaah apakah partisipasi tersebut telah meningkatkan akses sumber daya, memperkuat kapasitas bertindak (agency), dan menghasilkan perubahan konkret dalam kehidupan partisipan. Ketiga, teori pembangunan berbasis tempat dan modal sosial dari Putnam (2000) memberikan kerangka untuk memahami konteks kolektif, melihat bagaimana partisipasi perempuan dapat memperkuat jaringan komunitas sekaligus membangun hubungan dengan pihak eksternal, serta menilai inklusivitas dari proses tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dari informan penting seperti pengurus kampung tematik, ketua Lembaga pemberdayaan masyarakat, para seniman perempuan, dan

warga sekitar yang memiliki relevansi dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Observasi dilakukan secara langsung dengan melihat keterlibatan langsung para perempuan di kampung tematik dan berbagai kegiatan di Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing. Kemudian observasi juga dilakukan secara daring melalui laman resmi kampung tematik dan keluarahan tembalang mengenai perkembangan kampung tematik. Dokumentasi dilakukan terhadap pelatihan maupun kegiatan di kampung tematik serta dokumentasi terhadap dokumen tertulis seperti struktur kepengurusan kampung tematik dan Perwali No. 22 Tahun 2018.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan Kampung Tematik**

Partisipasi perempuan dalam pengembangan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing tidak hanya bersifat simbolis, tetapi mencerminkan kontribusi nyata yang membentuk identitas budaya kampung tersebut. Partisipasi ini terjadi pada berbagai tingkatan, mulai dari pelaksanaan operasional hingga inisiatif kreatif. Berdasarkan kerangka partisipasi Arnstein (1969), perempuan di kampung ini sering berada pada tingkat “keterlibatan” hingga

“kemitraan” dalam ranah kesenian. Secara khusus, peran mereka tercermin dalam posisi sebagai guru tari, seniman muda, dan pelestari seni tradisional seperti ketoprak, karawitan, dan kuda lumping. Meskipun menghadapi beban ganda domestik, perempuan mampu berperan sebagai agen perubahan yang menghidupkan warisan budaya lokal, sesuai dengan temuan studi terdahulu mengenai peran gender dalam pelestarian seni tradisional.

Salah satu wujud keterlibatan nyata tampak dari peran perempuan sebagai pelatih tari di studio seni. Mereka tidak sekadar menurunkan kemampuan, melainkan membangun ikatan antar generasi. Dwi, yang punya Sanggar Tari Sekar Arum, bilang bahwa mengajar tari itu berangkat dari tekad menjaga seni lama di tengah gempuran hal baru. Kegiatan ini lebih dari sekadar rutinitas, melainkan upaya menguatkan perempuan muda, menjadikan pelatih tari contoh soal bagaimana seni bisa jadi jalan membebaskan diri dari aturan ayah yang membatasi gerak perempuan di ranah umum.

Akan tetapi, studi ini juga memperlihatkan bahwa peran perempuan dalam pengambilan keputusan masih agak terbatas. Ini cocok dengan pandangan gender Robert Stoller (1968) yang bilang gender itu buatan masyarakat. Di Kampung Jurang

Belimbing, buatan ini terlihat dari pembagian peran tradisional, dimana pria lebih menguasai urusan luar dan mengambil putusan, sementara wanita lebih banyak berkutat di rumah dan urusan teknis. Meskipun kesempatan partisipasi secara formal terbuka, norma gender yang mengakar membuat perempuan cenderung tidak percaya diri dan enggan aktif dalam forum strategis. Kondisi ini mencerminkan teori partisipasi masyarakat, di mana partisipasi perempuan masih berada pada tingkat *tokenism* (kehadiran simbolis) dan belum mencapai tingkat *citizen power* (kekuasaan warga) yang substantif.

### **1. Partisipasi Perempuan di Kampung Tematik**

Partisipasi perempuan dalam pembangunan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing dapat dianalisis menggunakan kerangka tangga partisipasi Arnstein (1969), khususnya pada tingkat *tokenism* yang meliputi: *informing* (pemberian informasi), *consultation* (konsultasi), dan *placation* (penenteraman). Temuan penelitian menunjukkan bahwa partisipasi perempuan berada pada rentang *tokenism*, terutama pada tingkat *consultation* hingga *placation*.

Perempuan aktif diundang dalam rapat-rapat PKK, musyawarah RW, atau kegiatan Pokdarwis, bahkan beberapa menduduki jabatan seperti bendahara. Namun, keputusan strategis mengenai tema seni tahunan, alokasi dana, kerja sama dengan pihak luar, dan jadwal acara tetap dikuasai oleh laki-laki dalam kepengurusan inti. Perempuan boleh menyampaikan usul, tetapi jarang sekali usul tersebut menjadi keputusan akhir.

Partisipasi perempuan dapat dikategorikan ke dalam dua ranah utama:

- 1) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional kegiatan: Perempuan terlibat langsung dalam kegiatan pentas atau *event*, seperti penyediaan konsumsi, dekorasi panggung, pengelolaan logistik, dan pemanduan wisata. Kontribusi mereka vital dan sering diakui oleh masyarakat.
- 2) Partisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan: Meskipun secara formal diundang dalam forum musyawarah, keaktifan

perempuan dalam menyampaikan pendapat dan usulan masih terbatas. Kegiatan seperti perencanaan program tahunan, alokasi anggaran, dan penentuan kebijakan masih didominasi laki-laki.

Struktur kepengurusan Kampung Tematik dan Pokdarwis juga mencerminkan ketimpangan ini. Dari 13 posisi dalam Pokdarwis, hanya tiga yang diisi perempuan, yaitu dua sebagai bendahara dan satu sebagai anggota seksi. Mayoritas posisi strategis seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan koordinator seksi masih didominasi laki-laki. Kondisi ini mengonfirmasi bahwa partisipasi perempuan masih bersifat simbolis dan belum memberikan pengaruh signifikan terhadap arah pembangunan kampung.

## **2. Persepsi terhadap Kesetaraan Kesempatan Partisipasi Perempuan**

Persepsi masyarakat terhadap kesempatan partisipasi perempuan dalam pembangunan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing bersifat kompleks dan paradoks.

Secara umum, tidak ada pembatasan formal atau diskriminasi eksplisit terhadap partisipasi perempuan. Baik informan laki-laki maupun perempuan menyatakan bahwa kesempatan untuk terlibat terbuka lebar bagi semua warga. Namun, dalam praktiknya, rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan lebih sering dikaitkan dengan faktor internal perempuan sendiri, seperti kurangnya minat, kepercayaan diri, atau kesibukan domestik.

Ketua Pengurus Pokdarwis, menyatakan bahwa secara prinsip hak perempuan dan laki-laki dianggap setara, tetapi dalam praktik perempuan jarang dilibatkan dalam forum strategis. Ketua PKK RW 04, menambahkan bahwa meskipun kesempatan sama, minat dari perempuan yang rendah. Banyak perempuan kurang berminat mengikuti rapat dan musyawarah, cenderung mengikuti arahan saja dan tunduk pada keputusan yang telah dibuat laki-laki.

Kurangnya minat tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain anggapan bahwa



keputusan laki-laki sudah tepat, rasa tidak pantas untuk berpendapat, serta kendala praktis seperti rapat yang diadakan pada malam hari sehingga banyak perempuan tidak diizinkan keluar rumah. Fenomena ini mengindikasikan bahwa budaya patriarki masih mengakar, bahkan diinternalisasi oleh perempuan sendiri melalui konsep “*sendiko dawuh*” (patuh dan mengikuti). Secara teoritis, kondisi ini mencerminkan partisipasi perempuan pada tingkat *tokenism* atau *placation* dalam tangga partisipasi Arnstein (1969), di mana kehadiran fisik ada tetapi tanpa pengaruh nyata terhadap keputusan.

### **3. Dampak Keterlibatan Perempuan terhadap Dinamika Kampung**

Keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan kampung tematik telah membawa dampak positif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, meskipun dampak tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya transformatif. Dari aspek sosial, partisipasi perempuan dalam pelatihan dan pertunjukan seni telah mempererat hubungan antarwarga

dan meningkatkan kohesi sosial. Kegiatan seni menjadi wadah interaksi lintas generasi yang menghidupkan ruang sosial kampung.

Dari aspek ekonomi, partisipasi perempuan dalam kegiatan UMKM dan penjualan pada event-event tertentu telah memberikan tambahan pendapatan bagi keluarga. Contohnya, pelatihan pembuatan onde-onde dan kerajinan rajut memungkinkan perempuan menjual produk mereka pada acara *Car Free Day* (CFD) atau sedekah bumi. Namun, dampak ekonomi ini masih insidental karena kurangnya pendampingan pemasaran dan akses modal, sehingga belum mampu menciptakan kemandirian ekonomi jangka panjang.

Dampak keterlibatan perempuan ini mencerminkan peran mereka sebagai “tulang punggung” operasional kampung. Secara sosial, partisipasi mereka sejalan dengan teori partisipasi gender dalam pembangunan yang dikemukakan oleh Cornwall (2003), yang menyatakan bahwa perempuan membuat dinamika komunitas lebih baik melalui inovasi dan pemahaman

tentang kebutuhan lokal. Namun, dari perspektif ekonomi, temuan ini mendukung kritik Chant dan Gutmann (2000) bahwa pemberdayaan perempuan sering terbatas pada elemen reproduktif tanpa mengubah struktur kekuasaan ekonomi. Meskipun perempuan menghasilkan pendapatan tambahan, laki-laki masih memegang kendali atas anggaran kampung.

Secara keseluruhan, dampak keterlibatan perempuan belum optimal karena kurangnya integrasi perspektif gender dalam kebijakan Perwali Nomor 22 Tahun 2018. Untuk memaksimalkan dampak tersebut, diperlukan program yang lebih inklusif, seperti alokasi dana rutin untuk UMKM perempuan, agar dinamika kampung menjadi lebih berkelanjutan, adil, dan transformatif bagi seluruh masyarakat.

### **Tantangan Partisipasi Perempuan**

Di Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing, partisipasi perempuan tampak jelas dan nyata dalam kegiatan sehari-hari. Namun, di balik aktivitas yang ramai itu, terdapat lapisan hambatan yang membuat perempuan tetap berada di pinggiran arena kepemimpinan dan pengambilan keputusan

strategis. Partisipasi perempuan dalam pembangunan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing tidak hanya terkendala oleh faktor teknis atau administratif, tetapi juga oleh hambatan struktural, kultural, dan generasional yang saling bertautan. Tantangan-tantangan ini bukan hanya sekadar kendala individu, melainkan merupakan bentuk ketimpangan gender yang tersistematis dan berakar dalam relasi sosial di tingkat komunitas. Melalui analisis temuan lapangan, hambatan-hambatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga ranah utama yang saling memperkuat.

#### **1. Tantangan Berbasis Budaya dan Sosial (Socio-Cultural Constraints)**

Tantangan paling mendalam berasal dari konstruksi sosial budaya yang masih memposisikan perempuan dalam peran domestik dan pendukung. Norma patriarki yang kuat di kampung ini tercermin dalam pandangan bahwa perempuan cukup menjadi “konco wingking” atau pendamping di belakang layar, sementara laki-laki memegang otoritas dalam pengambilan keputusan publik. Norma ini tidak hanya datang dari laki-laki, tetapi juga telah diinternalisasi oleh banyak perempuan sendiri, sehingga

melahirkan budaya “sendiko dawuh” yaitu sikap patuh dan mengikuti tanpa banyak memberikan masukan kritis.

Beban ganda yang ditanggung perempuan menjadi penghalang nyata dalam partisipasi publik. Mayoritas perempuan di Jurang Belimbing harus membagi waktu antara mengurus rumah tangga, merawat anak, bekerja mencari nafkah (misalnya melalui usaha kos-kosan, warung, atau laundry), dan berpartisipasi dalam kegiatan kampung. Pembagian peran domestik yang tidak setara dengan pasangan membuat partisipasi perempuan dalam forum-forum strategis yang sering diadakan pada malam hari kini menjadi sulit diakses. Selain itu, kurangnya kepercayaan diri untuk berbicara di ruang publik, terutama dalam forum yang didominasi laki-laki, semakin mengukuhkan posisi perempuan sebagai partisipan pasif.

## **2. Tantangan Berbasis Sumber Daya dan Kelembagaan**

Secara kelembagaan, program-program pemberdayaan perempuan di kampung tematik ini masih bersifat insidental, sporadis, dan tidak terintegrasi dalam sistem

perencanaan yang berkelanjutan. Pelatihan yang diberikan sering kali hanya dilaksanakan pada momen tertentu, seperti saat ada kunjungan institusi, peringatan hari besar, atau program KKN mahasiswa. Setelah pelatihan usai, tidak ada mekanisme pendampingan lanjutan, akses pemasaran, atau dukungan permodalan yang memadai. Akibatnya, keterampilan yang telah diperoleh perempuan tidak berkembang menjadi usaha mandiri yang berkelanjutan.

Dukungan pemerintah kelurahan dan kota juga sangat terbatas. Meskipun kebijakan kampung tematik telah diatur dalam Perwali No. 22/2018, implementasinya di lapangan lebih mengandalkan swadaya masyarakat. Tidak ada anggaran khusus, skema pendampingan teknis, atau kebijakan afirmatif yang menjamin keterlibatan perempuan dalam struktur pengambilan keputusan. Ketiadaan forum khusus perempuan yang memiliki kewenangan nyata dalam perencanaan kampung semakin memperlemah posisi tawar mereka.

### **3. Tantangan Generasi: Minimnya Partisipasi Perempuan Muda**

Regenerasi partisipasi perempuan muda menjadi tantangan strategis yang mengancam keberlanjutan kampung tematik. Banyak perempuan muda lebih memilih untuk fokus pada pendidikan formal, bekerja di luar daerah, atau mengembangkan karier di sektor modern, sehingga waktu dan minat untuk terlibat dalam kegiatan seni tradisional semakin berkurang. Selain itu, seni tradisional seperti ketoprak, karawitan, atau kuda lumping sering dipandang kurang relevan dengan gaya hidup kekinian, sehingga kurang menarik bagi generasi muda.

Faktor keluarga juga turut memengaruhi. Tidak sedikit perempuan muda yang setelah menikah harus mengikuti suami atau dibatasi ruang geraknya oleh norma keluarga. Minimnya program yang dirancang khusus untuk menarik minat generasi muda, misalnya melalui pendekatan digital, konten kreatif, atau kolaborasi dengan kampus dapat memperparah kondisi ini. Jika tidak ada upaya sistematis untuk melibatkan perempuan muda,

maka proses pewarisan budaya dan kepemimpinan perempuan di kampung tematik ini terancam terputus.

#### **Program Pemberdayaan Perempuan**

Program pemberdayaan perempuan di Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu pemberdayaan melalui seni budaya dan pemberdayaan ekonomi. Pada ranah seni budaya, terdapat sanggar-sanggar seni seperti Sekar Arum (tari), Sri Mulyo (ketoprak), dan Turonggo Tunggak Semi (kuda lumping) yang aktif mengadakan latihan rutin. Di sisi ekonomi, program yang dijalankan meliputi pelatihan kuliner tradisional, kerajinan tangan, serta peluang berjualan di *Car Free Day* (CFD) dan acara-acara kampung.

Namun, sebagaimana diungkap dalam temuan, program-program tersebut masih bersifat insidental dan belum berkelanjutan. Pelatihan sering kali diadakan hanya pada momen tertentu tanpa rencana tindak lanjut yang jelas. Dukungan pemerintah setempat juga minim, lebih bersifat seremonial daripada substantif. Akibatnya, meskipun

kapasitas individu perempuan meningkat, dampaknya terhadap kemandirian ekonomi dan penguatan posisi tawar mereka dalam pengambilan keputusan masih sangat terbatas.

### **1. Ragam dan Sifat Pemberdayaan**

Di Kampung Tematik Jurang Belimbing, program pemberdayaan perempuan berbasis seni budaya dan ekonomi. Pelatihan karawitan, tari, dan ketoprak adalah bagian dari kegiatan pemberdayaan seni budaya. Kegiatan ini didukung oleh sanggar seperti Sekar Arum, yang mengadakan latihan rutin pada Rabu dan Minggu untuk sekitar 50 siswa SD. Kemudian ada pula sanggar ketoprak Sri Mulyo, yang mengadakan ketoprak dan sanggar kuda lumping Turonggo Tunggak Semi, yang mengadakan latihan kuda lumping pada Sabtu malam. Di panggung pentas kampung, kegiatan ini dilakukan secara rutin dan melibatkan perempuan dewasa serta anak muda. Ini termasuk anak-anak dari TK atau PAUD yang membayar 10 ribu rupiah per anak untuk belajar membuat onde-onde atau memainkan gamelan. Selama program KKN

mahasiswa UNDIP, kunjungan seperti ini juga terjadi, yang membawa peserta baru dari luar kampung dan meningkatkan partisipasi secara keseluruhan.

Untuk pemberdayaan ekonomi, program meliputi pelatihan membuat makanan tradisional seperti onde-onde, kerajinan rajut, ecobrick, serta peluang berjualan di Car Free Day (CFD) UNDIP setiap Minggu pagi atau selama pementasan seni. Supriyanto menjelaskan bahwa pelatihan ini sering diadakan saat rapat PKK RT/RW dan melibatkan anak muda selain ibu-ibu, sehingga bukan hanya kalangan dewasa yang mendapat manfaat. Di CFD, tidak hanya warga kampung yang berjualan, tetapi juga sanggar seperti Turonggo Tunggak Semi tampil, yang menarik pengunjung dari luar Tembalang dan membantu mengenalkan kampung tematik. Hal ini meningkatkan partisipasi masyarakat dan potensi ekonomi sekitar, karena semakin banyak orang yang datang, semakin banyak pula yang mengenal dan mendukung kegiatan kampung.

Meskipun varietas program ini sangat beragam dan memiliki

potensi besar untuk berubah, kelemahan utamanya adalah sifatnya yang internal. Seringkali, program diadakan hanya sebagai bagian dari acara tertentu, seperti peringatan hari besar atau kunjungan ke institusi, tanpa rencana tindak lanjut yang jelas. Ini adalah apa yang dikatakan Arum Sartikasari tentang masalah pemasaran yang menyebabkan pelatihan onde-onde dan rajut terhenti. Program ideal harus berubah dari ketergantungan menjadi kemandirian, menurut Sulistiyani (2004) dan Zakiyah (2010). Namun, ini mengharuskan akses dasar tanpa memperoleh kemampuan yang berkelanjutan. Agar program tidak hanya menjadi kegiatan sementara tetapi benar-benar membangun kemandirian perempuan, diperlukan pendekatan lebih holistik, termasuk pendampingan pasar, permodalan, dan pemasaran digital.

## **2. Peran Pemerintah dan Lembaga Lokal dalam Pemberdayaan**

Peran pemerintah kelurahan dalam program pemberdayaan perempuan di Jurang Belimbing masih sangat minim, lebih bersifat simbolis daripada substantif, seperti

hanya hadir saat acara besar tanpa pendampingan atau pendanaan rutin yang berkelanjutan. Slamet Suwadi menegaskan bahwa hal ini menyebabkan kampung harus bergerak secara swadaya melalui iuran warga atau inisiatif individu, meskipun secara administratif berada di bawah koordinasi kelurahan dan pemerintah kota. Pelatihan keterampilan dari kelurahan juga sering insidental dan tidak terintegrasi, sehingga tidak mampu mentransformasi posisi perempuan menjadi mandiri secara ekonomi atau sosial.

Sebaliknya, lembaga lokal seperti PKK, Pokdarwis, dan LPMK menunjukkan peran yang lebih aktif dan hands-on. PKK sering mengadakan pelatihan pilah sampah, ecobrick, rajut, dan daur ulang saat rapat RT/RW, sementara LPMK mendukung langsung kegiatan seperti pelatihan tanaman toga, taman hias, seni ketoprak melalui kolaborasi dengan Sanggar Sri Mulyo, lomba UMKM, serta menjadi jembatan aspirasi warga ke kelurahan. Karna'an menegaskan bahwa LPMK dibentuk dari dan untuk masyarakat, sehingga

selalu terlibat mulai dari penasihat hingga penyelenggara, termasuk pengambilan keputusan untuk perkembangan kampung tematik. Ini menunjukkan bahwa lembaga lokal lebih dekat dan memahami kebutuhan warga dibandingkan pemerintah atas.

### **3. Dampak Program Pemberdayaan terhadap Kapasitas dan Kemandirian Perempuan**

Program pemberdayaan ini telah berdampak positif pada peningkatan kapasitas perempuan, terutama dalam keterampilan seni dan ekonomi, serta kepercayaan diri untuk tampil di ruang publik. Sebagai contoh, pelatihan tari dan karawitan telah memungkinkan perempuan muda seperti Rizkyana Mega berkembang dari peserta menjadi guru tari dan koreografer di Sanggar Sekar Arum, sementara pelatihan onde-onde dan rajut memberikan wawasan untuk berjualan mandiri di CFD atau acara kampung. Kispanti menegaskan bahwa banyak ibu-ibu kini berani jualan sendiri, meski awalnya hanya di acara kecil, yang menjadi langkah awal penting untuk agency mereka sebagaimana dijelaskan Kabeer (1999). Seni

menjadi medium emansipatif yang membantu perempuan keluar dari peran domestik dan mengaktualisasi diri.

Selain itu, batas gender mulai bergeser ketika perempuan seperti Andiena Cahya terlibat dalam sanggar ketoprak dan kuda lumping, di mana mereka membuat musik, tata rias, dan menulis naskah adaptif, yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan seni tidak hanya mempertahankan budaya tetapi juga memberikan mereka keyakinan dan perspektif baru sebagai "pelaku seni" atau "pengajar tari". Proses ini sejalan dengan konsep agency Kabeer, di mana perempuan tidak hanya memiliki kemampuan, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menggunakan kemampuan tersebut untuk menentukan hidup mereka sendiri dan berkontribusi pada komunitas.

Karena tidak adanya pendampingan pasca-pelatihan atau akses pasar, produk seperti tas rajut atau kaligrafi sering tidak laku jangka panjang, menurunkan motivasi dan menghambat kreativitas. Akibatnya,

kemandirian ekonomi masih terbatas. Arum Sartikasari mengakui bahwa masalah pemasaran adalah penghalang utama. Akibatnya, program ini belum mencapai prestasi nyata seperti kemandirian stabil (Kabeer, 1999; Moser, 1993). Wanita terjebak dalam pekerjaan produktif tanpa dukungan karena hambatan struktural seperti kurangnya strategi pasar dan integrasi gender. Untuk dampak yang lebih komprehensif dan berkelanjutan, pelatihan promosi, permodalan, dan pemasaran diperlukan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu menganalisis partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing, Kota Semarang, berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 22 Tahun 2018. Kebijakan tersebut bersifat top-down dengan hierarki jelas dan kontrol terpusat, yang membatasi partisipasi masyarakat pada tingkat pelaksanaan. Melalui pendekatan kualitatif studi kasus, observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen, diperoleh beberapa kesimpulan utama.

Partisipasi perempuan tinggi dalam kegiatan operasional, seperti menyiapkan acara, mengajar di sanggar seni, melakukan pementasan, dan mengelola bisnis. Karena peran mereka yang besar dalam menjaga kelancaran aktivitas sehari-hari, perempuan sering disebut sebagai "tulang punggung" kampung tematik. Namun, partisipasi pasif pada tahap perencanaan strategis dan pengambilan keputusan, di mana laki-laki dan perempuan mendominasi forum musyawarah dan struktur kepemimpinan Pokdarwis, cenderung terjadi. Menurut tangga partisipasi Arnstein (1969), partisipasi perempuan berkisar dari tokenisme hingga penempatan, belum mencapai partnership atau kontrol warga negara yang memberikan kuasa substantif.

Tantangan utama dari partisipasi perempuan dalam pembangunan Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing adalah:

- 1) Norma patriarki dan beban ganda yang membatasi perempuan pada ranah domestik dan "belakang layar".
- 2) Keterbatasan kelembagaan, seperti anggaran rutin yang rendah dan kurangnya wadah khusus untuk perempuan berwenang.
- 3) Kurangnya regenerasi generasi muda karena pendidikan dan pekerjaan luar daerah menjadi prioritas utama.



Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan top-down Perwali No. 22/2018 mereplikasi ketimpangan gender dalam pembangunan lokal berbasis seni karena tidak mengintegrasikan pengarusutamaan gender dengan baik. Penelitian terbaru membahas kritik gender kritis terhadap pelaksanaan kampung tematik. Ini melengkapi literatur sebelumnya dengan pandangan partisipasi transformatif perempuan. Secara keseluruhan, perempuan memiliki posisi yang sangat baik untuk memimpin pembangunan inklusif; namun, mereka belum memiliki ruang kekuasaan dan mekanisme pemberdayaan yang cukup untuk memenuhi potensi ini.

Program pemberdayaan perempuan mencakup pelatihan seni tradisional (tari, karawitan, ketoprak, kuda lumping) serta kerajinan dan kuliner, disertai peluang ekonomi melalui CFD dan kunjungan wisata. Program ini meningkatkan keterampilan, kepercayaan diri, dan kohesi sosial, tetapi bersifat insidental tanpa dukungan berkelanjutan seperti pendampingan pemasaran atau akses modal. Akibatnya, dampak terhadap kemandirian ekonomi dan pengaruh pengambilan keputusan tetap terbatas.

## **SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian tentang partisipasi dan pemberdayaan perempuan di Kampung Tematik Seni Jurang Belimbing, berikut saran praktis untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan transformatif:

1. Pemerintah Kota Semarang dan Kelurahan Tembalang, perlu melengkapi Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 dengan ketentuan pengarusutamaan gender yang tegas, termasuk alokasi anggaran khusus pemberdayaan perempuan, monitoring partisipasi berbasis gender, serta pendanaan rutin dan fasilitasi akses pasar bagi produk ekonomi perempuan. Hal ini untuk mengatasi sifat top-down kebijakan yang selama ini membatasi dukungan struktural.
2. Pengelola kampung (Pokdarwis, LPMK, PKK), disarankan membentuk komite atau wadah khusus perempuan dengan kewenangan setara dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Program pemberdayaan juga harus direstrukturasikan menjadi berkelanjutan melalui pendampingan

pemasaran digital, akses permodalan, dan manajemen usaha, sehingga kegiatan insidental berubah menjadi sumber kemandirian ekonomi jangka panjang.

3. Untuk regenerasi generasi muda, perlu kolaborasi intensif dengan sekolah, perguruan tinggi, dan komunitas seni guna meningkatkan minat perempuan muda terhadap seni tradisional, misalnya melalui program insentif seni atau integrasi dalam kurikulum lokal, agar keberlanjutan budaya dan ekonomi kampung tetap terjaga.
4. Bagi peneliti berikutnya, disarankan melakukan studi komparatif antar-kampung tematik di Semarang dengan pendekatan campuran (kuantitatif-kualitatif) untuk menguji generalisasi temuan, serta evaluasi dampak jangka panjang pemberdayaan berbasis seni terhadap kemandirian ekonomi dan posisi tawar perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

Andika, R., et al. (2024). *Peran dan tantangan perempuan dalam kepemimpinan desa*. Jurnal Parlemonter, 5(2), 1-15.

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen

participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>

Butler, J. (1990). *Gender trouble: Feminism and the subversion of identity*. Routledge.

Chaerunnisa, C., Rahman, N., & Hasyim, M. (2023). Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan: Episode Kelahiran Sawerigading. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7): 2480–2491. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1148b>

Chant, S., & Gutmann, M. C. (2000). *Mainstreaming Men into Gender and Development: Debates, Reflections, and Experiences*. Oxfam GB.

Cresswell. (2007). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage Publication.

Cornwall, A. (2003). Whose Voices? Whose Choices? Reflections on Gender and Participatory Development. *World Development*, 31(8), 1325–1342.

Fitriyani, Vira Nurul., Prilla Marsingga., dan Rahmat Hidayat. (2022). Pemerintahan dan Gender Studi Tentang Peran Perempuan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(3): 184 - 194.

Hatmadji, S. H., & Utomo, A. J. (2004). *Regenerasi Kesenian Tradisional di Jawa: Tantangan dan Peluang*. Makalah disajikan pada Seminar Nasional Kesenian Tradisional, ISI Yogyakarta.

Irhandayaningsih, Ana. (2018). *Kampung Tematik Sebagai Upaya Melestarikan Seni Dan Budaya Daerah di Jurang*

- Blimbing Tembalang Semarang. ANUVA, 2 (4): 377-385.
- Irhandayaningsih, Ana., Triyono., dan Muhyidin. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Kampung Jurang Belimbing Sebagai Kampung Seni dan Budaya di Kota Semarang Melalui Pelestarian Seni Tradisional Untuk Menunjang Kesejahteraan Rakyat Berdasarkan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. *Diponegoro Private Law Review*, 2(1): 241 – 247.
- Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third Millennium Development Goal. *Gender & Development*, 13(1), 13-24. <https://doi.org/10.1080/13552070512331332273>
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435-464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Novitasari, Diyah., dan Dewi Rostyaningsih. (2020). Analisis Stakeholder dalam Implementasi Kampung Tematik Seni dan Budaya di Kelurahan Tembalang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(1): 1 - 12.
- Pratiwi, A., et al. (2025). A review of the challenges and government initiatives to empower women through cooperatives in Indonesia. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, 9(1), 3805-3815. <https://rsisinternational.org/journals/ijriss/Digital-Library/volume-9-issue-1/3805-3815.pdf>
- Savitri, L. A. (2022). Dari Tokenisme ke Transformasi: Mengukur kualitas partisipasi perempuan dalam Musrenbang Kelurahan. *Jurnal Perempuan dan Pembangunan*, 5(1), 23–41.
- Stoller, R. J. (1968). Sex and gender: On the development of masculinity and femininity. Science House.